

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

□ Kabupaten Bogor bukan merupakan daerah yang masuk kedalam penghitungan IHK di Jawa Barat. BPS Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Bappedalitbang hanya menghitung inflasi sampai dengan Bulan September 2019, sedangkan dari Bulan Oktober 2019 s/d Bulan Nopember 2020 tidak menghitung inflasi, sehingga TPID Kabupaten Bogor terkait inflasi mengambil data dari sistercity daerah IHK yaitu Kota Bogor. □ Untuk Triwulan IV tahun 2021 (Oktober s.d Desember 2021) tingkat inflasi di Kota Bogor dilihat dari data inflasi bulanan cenderung fluktuatif. Inflasi Triwulan IV Kota Bogor (bulan Oktober s.d. Desember) mencapai 0,9%, Untuk bulan Oktober (0,08%) dimana Kota Bogor menempati urutan ke tiga di Jawa Barat sementara inflasi di bulan November (0,26%), menempati urutan ke lima, inflasi pada Bulan Desember 2021 Kota Bogor mengalami inflasi tertinggi di antara 7 Kota IHK yaitu sebesar 0.56%. Selama tahun 2021 (Januari - Desember) telah terjadi inflasi sebesar 1,93% atau terjadi kenaikan indeks dari 107,12 pada bulan Desember 2020 menjadi 109,19 pada bulan Desember 2021. □ Berdasarkan data harga rata-rata komoditas di Kabupaten Bogor pada periode Oktober- Desember 2021, dari 16 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, 2 komoditas mengalami fluktuasi harga yaitu Gula Pasir dan Cabai Rawit Merah. 1 komoditas mengalami inflasi harga yaitu Minyak Goreng Curah, Sementara 13 komoditas lainnya yaitu Beras Premium, Beras Medium, Tepung Terigu, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Hijau, Jagung Pipilan, Kacang Kedelai, Daging Ayam Ras, Daging Sapi (Murni) dan Telur Ayam Ras dalam kondisi stabil.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

□ Nilai inflasi dihitung oleh BPS hanya untuk level Kota sehingga nilai Inflasi Kabupaten Bogor masih mengacu kepada nilai Inflasi Kota Bogor. □ Kegiatan Operasi Pasar Murah sebagai antisipasi kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat. □ Sinergi kegiatan pengendalian inflasi 2021.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

□ Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dan langkah pengendalian Inflasi Daerah Triwulan IV Tahun 2021 yaitu: a) Kegiatan Pemantauan Harga, Stok dan Operasi Pasar diantaranya : □ Melakukan pemantauan ke Minimarket di Kecamatan Ciawi dan Sidak Pasar di Pasar Rakyat Ciawi; □ Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Data Stock Gabah dan Beras) Penggilingan di Desa Joggol Kecamatan Jonggol dan Pasar Cisarua Kecamatan Cisarua pada tanggal 1 dan 2 Desember 2021 oleh Dinas Ketahanan Pangan; □ Pemantauan ke SPBE dan agen LPG 3 Kg bersubsidi di Kecamatan Ciawi pada tanggal 7 Desember 2021 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor; □ Melakukan Operasi Pasar ke Pasar Cileungsi Kabupaten Bogor bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Airlangga Hartarto dalam rangka menjaga pasokan dan menstabilkan harga beberapa bahan pangan yang mengalami tren kenaikan dalam menjelang akhir tahun pada tanggal 29 Desember 2021. b) Peresmian Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Gapoktan Tanjung Harapan Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari yang diresmikan langsung oleh Bupati Bogor oleh Dinas Ketahanan Pangan. c) Bantuan sarana dan prasarana pertanian (benih, pupuk, obat-obatan dan alsintan) oleh Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan. d) Pembangunan / perbaikan jaringan irigasi oleh Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan. e) Gerakan membeli produk lokal (beras carita

makmur) untuk seluruh ASN Kabupaten Bogor oleh Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan bekerjasama dengan Perumda Pasar Tohaga. f) Pada masa Pandemi Covid-19, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tidak melaksanakan Bazar, tetapi melaksanakan kegiatan pelatihan pembinaan usaha mikro kepada pelaku usaha dan memfasilitasi kemudahan perizinan Usaha Mikro. □ Di tengah Pandemi Covid-19, ketersediaan pangan menjadi hal yang krusial. Isu yang menjadi perhatian utama adalah distribusi kebutuhan pokok masyarakat dari sentra produksi ke pasar hingga konsumen. Hal yang dilakukan Kabupaten Bogor adalah : □ Optimalisasi fungsi pasar untuk distribusi barang dan menjaga stabilitas harga. □ Mendorong transaksi online melalui kerja sama antara pasar tradisional dan e-commerce dan perbankan. □ Penguatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) untuk memperluas akses informasi harga pangan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Distribusi Bahan Pokok Dan Upaya Stabilisasi Harga diantaranya : □ Perlunya optimalisasi sinkronisasi program kerja terkait pengendalian harga antar lembaga/ instansi terkait. □ Minimnya dukungan pasokan data pantauan harga pangan strategis di Kabupaten Bogor. □ Perlunya kemudahan distribusi melalui promosi dan pemasaran secara digital.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

□ Membuat aplikasi terkait stok harga kebutuhan pokok masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor. □ Pengembangan program Inklusi keuangan pada sektor Pertanian, Peternakan maupun UMKM Kabupaten Bogor. □ Mendorong transaksi keuangan secara digital baik di lingkungan pemerintah maupun di masyarakat.